



Media Massa : **HARJO** Hari : **SENIN** Tanggal : **14/08/2017** Halaman : **1**

**GAJI ANGGOTA DEWAN**

### Puluhan Juta Habis dalam Hitungan Hari

*Sepinas lalu, pendapatan bulanan anggota DPRD sangat besar, jauh lebih besar dibandingkan dengan penghasilan kebanyakan orang. Namun, gemaknya pemasangan berbanding lurus dengan besarnya pengeluaran. Tak sedikit politisi lokal yang mengeluh karena gaji hanya numpang lewat di buku rekening. Mereka pun mengkal sumber-sumber pendapatan lain yang bisa dimanfaatkan. Berikut laporan wartawan Harian Jogja Ujang Hasanudin & Arief Junianto.*

**B**erapa uang yang masuk dompet anggota DPRD Kota Jogja saban bulan? Berapa nilai upah minimum pekerja di kota madya tersebut? Rp33 juta sampai Rp35 juta untuk pertanyaan pertama dan Rp1,5 juta untuk pertanyaan kedua. Apakah orang-orang yang berada di kategori pertama tak pernah mengeluh kekurangan duit saat akhir bulan? Belum tentu.

Jumat (11/8) pekan lalu, seorang anggota Dewan Kota Jogja mesem saat ditanya soal gaji yang bakal diterimanya pada September nanti yang mencapai Rp35 juta setelah nilai tunjangan sebagai wakil rakyat naik. Senyuman di bibirnya pantas pengembang karena gaji bulanan sebelumnya hanya Rp18 juta. "Paling enggak saya bisa menyisihkan uang untuk kepentingan keluarga," ucap dia yang tak mau namanya disebut karena merasa sungkan.

Politikus yang sudah lebih dari satu periode menjadi anggota DPRD itu mengaku nyaris tidak bisa menabung dari hasil jerih payahnya sebagai legislator.

**Puluhan Juta...**

Alih-alih menyisihkan duit dari gaji, dia bahkan belum melunai utang kampanye pada pemilu 2014. Saat mencalonkan diri sebagai anggota Dewan, ia menghabiskan lebih dari Rp400 juta. Duit segede itu sebagian besar ia pinjam dari bank. Sisanya hasil simpanan sebagai anggota DPRD Kota Jogja periode sebelumnya.

Selain utang yang masih melilit, tunggungannya juga seanebak. Dia harus menyotor ke partai politik. "Tempo hari ia harus mengeluarkan puluhan juta untuk acara partai. Lagi-lagi ia harus meminjam ke bank. "Andalannya surat keputusan sebagai anggota Dewan," kata dia.

Belum lagi titkala dia menerima setumpuk proposal kegiatan yang diajukan konstituen di daerah pemilihannya, juga proposal dari kader partai tingkat daerah hingga ranting. Meski tidak wajib memenuhi kebutuhan anggaran yang tercantum dalam proposal, ia merasa berutang budi. Dia tak ingin dicap sebagai politikus yang lupa diri. Akhirnya, duit jutaan rupiah pun dikucurkan.

"Saya rajin ngopini sukarelawan di daerah pemilihan agar tidak kesulitan ketika kembali mencalonkan diri," ujar dia.

Pengakuan serupa diungkapkan anggota DPRD Kota Jogja lainnya dari fraksi berbeda. Dia yang memegang jabatan strategis di parlemen mengaku tak punya banyak duit untuk ditabung.

"Rata-rata yang dibawa pulang ke rumah tinggal Rp5 juta atau Rp8 jutaan, bahkan pernah sama sekali tidak ada yang dibawa pulang," kata dia.

Gajinya habis untuk cicilan utang kampanye, setoran ke partai, potongan untuk dana fraksi, dan apa yang dia sebut sebagai biaya sosial untuk kelahiran dan kematian, serta kumpul-kumpul bersama warga. Selama berpolitik membutuhkan dana yang besar, tunjangan memang harus dinaikkan," ucap dia.

**Mengakali Perjalanan Dinas**

Anggota DPRD DIY yang gajinya lebih besar ketimbang anggota DPRD tingkat kabupaten maupun kota juga mengklaim tak leluasa menabung. Dengan gaji dan tunjangan yang akan naik pada September nanti, anggota Dewan tingkat provinsi bisa mengantongi Rp70 juta.

"Bagi orang yang tidak tahu dunia DPRD, jelas angka itu sangat besar dan mewah," kata salah seorang legislator saat ditemui di Gedung DPRD DIY belum lama ini.

Dia lantas bercerita betapa gajinya yang berlipat-lipat lebih banyak daripada gaji buruh ternyata hanya bertahan di rekening tak lebih dari dua pekan. Uang masuk di awal bulan, habis sebelum tengah bulan, mirip dengan irama lalu lintas keuangan pekerja kantor bergaji Rp3 juta yang dibebani tagihan kredit rumah, jalan-jalan bersama keluarga di akhir pekan, dan makan enak sekali waktu di restoran mahal.

"Ibu biasa. Saya rasa, semua anggota Dewan pasti mengalaminya. Apalagi dia berasal dari partai besar dan punya banyak konstituen," kata dia yang sudah dua periode menjadi anggota DPRD DIY.

Selama ini, sebelum tunjangan sebagai legislator dinaikkan, gajinya hampir Rp25 juta per bulan.

Pengeluaran tetap yang harus dia siapkan saban bulan mencapai belasan juta rupiah untuk partai dan konstituen.

"Terakhir, kalau tidak salah, saya berikan hampir Rp20 juta kepada salah satu kelompok masyarakat di dalam kota."

saat musim kawin dan sunatan, uang sebesar itu langsung habis dalam hitungan hari.

"Apalagi kalau sampai diundang secara khusus. Tidak mungkin kalau memberikan sumbangan seadanya. Paling tidak tetap ratusan ribu rupiah, atau kalau yang punya hajat itu saya kenal baik, bisa sampai jutaan," kata dia.

Satu-satunya yang bisa ia andalkan sebagai penghasilan adalah uang perijinan dinas. "Kan ada beragam kunker [kunjungan kerja], mulai kunker komisi hingga kunker panitia khusus. Ya kami atur sedikit-sedikit lah," ucap dia.

Seorang mantan anggota DPRD DIY juga mengakui perdin menjadi cara paling mujarab untuk mendapatkan tambahan pendapatan. "Bahkan tak jarang ada kunjungan kerja yang terkesan mengada-ada. Misalnya agenda konsultasi ke Jakarta, yang sebetulnya bisa dilakukan dengan korespondensi melalui telepon atau email, tetap diagendakan melalui perdin," ujar dia.

Kecondongan besar pasak daripada tiang yang dialami anggota DPRD yang sudah bergaji besar disebabkan rekrutmen politik di Indonesia berbunyi mahal.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Luchis Karus mengatakan gaji dan tunjangan anggota Dewan selama ini sudah jauh dari cukup. Namun, anggota DPRD selalu merasa kekurangan karena pengelolaan keuangan mereka sebagai politisi cenderung buruk.

"Apalagi demokrasi selalu diidentikan dengan proses berongkos tinggi," ujar dia.

Jika ingin menjadi anggota parlemen, tiap orang rata-rata harus rela keluar duit ratusan juta hingga miliaran rupiah. Jumlah itu selanjutnya

**Tindak Lanjut**

<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi	<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
<input type="checkbox"/> Untuk Ditinjau	<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
<input type="checkbox"/> Untuk Ditinjau	<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui

**- BPKAD**

Netral

Biasa

Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005